

Abstrak

NGO memiliki peran penting dalam agenda-agenda pemberantasan korupsi, juga program pencegahan korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Sulawesi Selatan. Masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk tindakan kolektif NGO dalam pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa Pemerintah tahun 2013-2017 di Sulawesi Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk tindakan kolektif NGO dalam pencegahan korupsi pengadaan barang/ jasa pemerintah tahun 2013-2017 di Sulawesi Selatan. Secara teoritik ada lima dimensi dalam tindakan kolektif (collective action) NGO dalam pencegahan korupsi yaitu: formasi kelompok, teknologi/ metode agregasi, sumber keuangan, keragaman kepentingan, dan tujuan kelompok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Yang menjadi sasaran penelitian adalah NGO-NGO anti korupsi, yaitu: ACC Sulawesi, KOPEL Indonesia, PeRAK Institute, FIK Ornop Sulsel dan YASMIB Sulawesi. Hasil penelitian menunjukkan tindakan kolektif NGO dalam mengadvokasi kasus korupsi, khususnya dugaan korupsi CPI dengan cara berkolaborasi, koalisi yang dibangun adalah “koalisi taktis” dimana dibentuk ketika ada isu yang menarik perhatian publik secara luas. Koalisi yang pernah dibentuk NGO adalah Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi dan Aliansi Selamatkan pesisir (ASP) Sulawesi, yang sama-sama mengadvokasi dugaan korupsi pengadaan barang/ jasa pemerintah kategori Jasa Konstruksi, Center Point of Indonesia (CPI). keberhasilan NGO dalam mengadvokasi kasus korupsi di Sulawesi selatan tidak terlepas dari peran media sebagai metode agregasi NGO untuk mencapai tujuannya, sumber keuangan NGO dalam mengadvokasi kasus korupsi secara tindakan kolektif berasal dari swadaya anggota koalisi, dimana ada beban pembiayaan yang ditanggung secara bersama, namun sumber keuangan NGO dalam melaksanakan program/ kegiatan pencegahan korupsi berasal dari lembaga donor Internasional. Dalam mengadvokasi kasus korupsi, khususnya kasus CPI, keragaman kepentingan NGO hanya terjadi pada poros isu yang menjadi konsen masing-masing lembaga yang tergabung dalam koalisi dan aliansi tersebut, dan setiap NGO memiliki metode agregasi masing-masing dalam pencegahan korupsi di Sulawesi Selatan. Seluruh anggota NGO yang tergabung dalam KMAK dan ASP memiliki tujuan yang sama, kehadiran/ keberadaan mereka selain mengakselerasi kesadaran masyarakat supaya masyarakat ikut andil dalam pengawasan dan pemantauan terhadap proyek-proyek pemerintah dan juga kehadiran/ keberadaan mereka sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah, memastikan tata kelola pemerintah berjalan baik dan benar, sehingga terwujud pengadaan barang/ jasa yang transparan, akuntabel, partisipasi dan bebas dari praktik-praktik koruptif.

Kata kunci : NGO, pengadaan publik, tindakan kolektif

Abstract

NGOs have an important role in anti-corruption agendas, as well as corruption prevention programs, particularly in the Government procurement sector in South Sulawesi. The problem of this research is how the form of collective action of NGO in preventing corruption procurement of Government goods and services in 2013-2017 in South Sulawesi. The purpose of this research is to know the form of collective action of NGO in preventing corruption of government goods / service procurement in 2013-2017 in South Sulawesi. Theoretically there are five dimensions in the collective action of NGOs in the prevention of corruption, namely: group formation, aggregation technology / methods, financial resources, diversity of interests, and group goals. This research uses qualitative method with data collection technique that is interview and documentation. Research subjects are anti-corruption NGOs: ACC Sulawesi, KOPEL Indonesia, PeRAK Institute, FIK Non-Governmental Organizations and YASMIB Sulawesi. The results of the study show the collective action of NGOs in advocating corruption cases, especially the alleged CPI corruption by way of coalition, the coalition being built is a "tactical coalition" which was formed when there is an issue that attracted public attention widely. The NGOs-established coalition is the Anti Corruption Community Coalition (KMAK) of Sulawesi and the Coastal Save Alliance (ASP) of Sulawesi, which simultaneously neglect the alleged corruption of government goods / services procurement of Construction Services category, Center Point of Indonesia (CPI). the success of NGOs in advocating corruption cases in South Sulawesi is inseparable from the role of the media as an NGOs aggregation method to achieve its objectives, the financial resources of NGOs in advocating corruption cases by collective action are derived from the self-help of coalition members, whereby there is a burden of co-financing, but the financial resources of NGOs in implementing corruption prevention programs / activities come from International donor agencies. In advocating corruption cases, particularly the case of the CPI, the diversity of NGOs interests only occurs on the issue spindle which becomes the consent of each of the institutions incorporated in the coalition and the alliance, and each NGOs has its own aggregation method in preventing corruption in South Sulawesi. All NGO members who are members of KMAK and ASP have the same purpose, their presence / existence in addition to public awareness raising so that the community participate in pengawasan and monitoring of government project projects and also their presence / existence as a social control of the government, ensuring governance running well and correctly, so that the procurement of goods / services is transparent, accountable, participation and free from corrupt practices.

Keywords: NGO, public procurement, collective action